

**STRATEGI KOMUNIKASI KPU BANGKALAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.) Dalam
Bidang Ilmu Komunikasi**



Oleh:
SITI ZAENAB
NIM: B76214051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Zaenab

NIM : B76214051

Prodi : Ilmu Komunikasi

Alamat : Jl Halim Perdana Kusuma Griya Utama Blok I No 16

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Penelitian ini benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala hukum yang terjadi

Surabaya, 06 Januari 2019

Yang menyatakan,



Siti Zaenab

NIM. B76214051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Siti Zaenab

NIM : B76214051

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan

Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan:

Surabaya, 06 Januari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP., M.Si

197301141999032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Siti Zaenab ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 07 Pebruari 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dekan,



Dr. H. Abd. Halim, M.Ag.
NIP. 196307251991031003

Penguji I



Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP., M.Si
NIP.197301141999032004

Penguji II



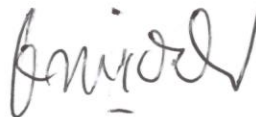
Dr. Ali Nurdin, S.Ag., M.Si
NIP. 197106021998031001

Penguji III



Muchlis, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197911242009121001

Penguji IV



Dr. Lilik Hamidah, S.Ag., M.Si
NIP. 197312171998032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI ZAENAB
NIM : B76214051
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Ilmu Komunikasi
E-mail address : szaenab159@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN BANEGALAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 JANUARI 2019

Penulis

(SITI ZAENAB)

nama terang dan tanda tangan

suara yang mereka berikan tidak mengubah nasib mereka atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Cara pandang mereka masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran bahwa nasib mereka seharusnya lebih baik jika mereka berpartisipasi dalam politik.

Ketiga, pengaruh pihak lain. partisipasi politik mereka dalam pemilu dalam bentuk ikut memberikan suara juga ditentukan oleh bagaimana pandangan dari kalangan pemuka agama, pimpinan 183 keluarga, atau teman. Jika orang-orang yang mereka hormati mengajak mereka untuk ikut pemilu, kemungkinan besar mereka akan berpartisipasi ikut memberikan suara mereka. Namun, bila orang yang mereka gugu dan mereka tiru serta hormati, seperti kalangan pemuka agama, menyatakan bahwa pemilu bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut, maka mereka mengikuti nasihat pemuka agama itu untuk tidak memberikan suaranya pada pemilu.

Keempat, persoalan kesukuan. Bila kandidat pemilu legislatif atau capres/cawapres tidak berasal dari suku atau etniknya, mereka enggan untuk memberikan suaranya dalam pemilu. *Kelima*, kurangnya partisipasi politik pada kalangan muda atau pemilih pemula. *Keenam*, rakyat yang tinggal di daerah perkotaan yang memiliki akses informasi dan transportasi yang jauh lebih baik ketimbang di daerah pedesaan, justru partisipasi politiknya dalam pemilu lebih rendah dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Ini disebabkan karena informasi yang mereka dapatkan tentang politik justru membuat mereka menjadi apatis terhadap politik dan enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu. *Ketujuh*, partisipasi politik perempuan dalam pemilu justru lebih tinggi ketimbang kaum laki-laki.

1. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul).

Penelitian terdahulu salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul)” Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dalam penelitiannya menjelaskan Strategi komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2015 dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen strategi komunikasi, seperti : Mengenal sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan, peranan komunikator dalam komunikasi. Upaya KPU Kabupaten Bantul untuk mengurangi angka golput pada pilkada 2015 telah menggunakan beberapa metode yaitu : Metode tatap muka dan dialog secara menarik, pemanfaatan aktifitas warga untuk mempermudah pertemuan bersama pihak KPU dan masyarakat, penggunaan beberapa media cetak dan elektronik secara maksimal, serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu.

Persamaan dari pemaparan penelitian terdahulu setidaknya ada beberapa persamaan. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama menggunakan strategi komunikasi komisi pemilihan umum. Perbedaan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu berfokus pada strategi komunikasi KPU dalam mengurangi

angka golput pada pilkada 2015, sedangkan penelitian saat ini berfokus untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADA.

2. Perencanaan Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Pemlihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur 2013 Di Kota Samarinda.

Penelitian dari sebuah Jurnal oleh Fachri, Perencanaan Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Pemlihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur 2013 Di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Komunikasi, FISIP UNMUL*. 2015, volum 3 nomer 3. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam melakukan sosialisasi tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 tidak melakukan perencanaan komunikasi dengan baik, sehingga tidak fokus dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilaksanakan yang mengakibatkan gagalnya dalam mencapai tujuan sosialisasi. Belum maksimalnya penggunaan media-media lokal seperti koran, radio, televisi sebagai saluran dan media penunjang dalam melakukan sosialisasi, serta penggunaan media baru seperti internet dalam rangka penyebaran informasi terkait tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013. Dalam melakukan sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda terkendala dari dana yang dikucurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur atau setingkat di atasnya, sehingga tidak maksimal dalam menggelar sosialisasi. Khususnya

tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Sementara Kerangka pikir diperoleh dari strategi yang dilakukan oleh KPU Bangkalan. Dalam melakukan pilkada serentak, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya berdemokrasi di kabupaten Bangkalan. Maka Kerangka penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak” yang menjadikan fokus penelitian dan menggunakan ikut berpartisipasi karena itu butuh pengertian dan pengetahuan terhadap pemilihan umum di Bangkalan.

Maka dari itu, KPUD Bangkalan menyampaikan pesan bahwa pentingnya demokrasi dengan cara mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mulai dengan cara yang paling konvensional yaitu memasang banner atau baliho serta bertatap muka dengan masyarakat (pemilih) sampai dengan cara mempromosikan setiap kegiatan di media social atau mengiklankan banner ke media mainstream.

Selain itu motivasi dan juga dukungan agar masyarakat berani dalam berpartisipasi dan tujuan dari pemilu. Penelitian dapat dilakukan dengan lima langkah strategis yaitu perumusan visi dan misi, pengkajian lingkungan eksternal, pengkajian lingkungan internal, perumusan isu-isu, penyusunan strategi pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejala seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejala dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- ✓ Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- ✓ Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- ✓ Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*).

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga

Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairudin (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai "*The taking part in one or more phases of the process*" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambil bagian dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu.

6.2 Pengertian Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara)

berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik. Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpanya: informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah)?

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Aspek inti dari definisi partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasi-orientasi para warganegara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Partisipasi politik didefinisikan sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

John Stuart Mill dalam Miriam Budiardjo (1994) menyatakan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi “tertinggi dan serasi” dalam rangka menuju jalan kebebasan dan pengembangan diri. Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan

fatal, terutama kerugian dari segi waktu, tenaga materi dan tenaga. Oleh karena itu strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana.

Strategi adalah dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena dalam tindakan mencapai tujuan, kekuatan dan kelemahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna. Karena dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki akan lebih mudah untuk mengoptimalkannya, Sebaliknya jika kita mengenal kelemahan, Kita akan bisa menghindari atau bahkan berusaha menciptakan kekuatan dari kelemahan tersebut.

Tidak dapat ditolak bahwa strategi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Untuk itu seorang ahli strategi tidak bisa membuat strategi dengan sembarangan. Untuk hal itu, Pengetahuan tentang pengertian strategi sangatlah penting. Jika pembuat strategi faham apa itu strategi, besar kemungkinan akan bisa menciptakan strategi yang lebih baik.

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan kepada beberapa persoalan terutama dalam penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Rogers (1982) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku seseorang

Pertama, pendekatan proses adalah suatu cara memandang masalah perencanaan komunikasi dilihat dari fungsi dan proses kegiatan komunikasi itu sendiri yang meliputi penerapan berbagai teori, mulai dari teori pembangunan, teori sosiologi, teori komunikasi dan teori organisasi. *Kedua*, pendekatan sistem adalah cara pandang terhadap perencanaan komunikasi sebagai suatu sistem yang merupakan suatu kesatuan dari sub-sub sistem komunikasi yang berkorelasi, baik secara struktural maupun fungsional. *Ketiga*, pendekatan teknologis adalah suatu cara pandang terhadap perencanaan komunikasi dengan perhatian pada aspek-aspek teknologi sebagai pendukung utama perencanaan komunikasi. *Keempat*, pendekatan ekonomis adalah suatu cara pandang terhadap perencanaan komunikasi dengan perhatian kepada aspek-aspek ekonomi sebagai pendukung utama perencanaan komunikasi. *Kelima*, pendekatan evaluasi adalah suatu cara pandang terhadap perencanaan komunikasi dengan menekankan kepada pandangan dan penilaian yang diinformasikan mengenai efektifitas program kegiatan yang sifatnya berkelanjutan.

kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan:

- ✓ Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak.
- ✓ Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.
- ✓ Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
- ✓ Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

“Demokrasi ini lahir kan tidak serta merta lahir layaknya orang melahirkan, karena demokrasi lahir dengan diringi budaya dan kebiasaan masyarakat. Di bangkalan sendiri, budaya patriaki kan luar biasa, sikap tunduk, sungkan terhadap kiai, sesepuh masih sangat kental sehingga seringkali terjadi pemilih datang ke TPS karena tekanan atau titipan dari sesepuh. Maka dari itu, ini menjadi tugas kita bersama, artinya kesadaran

tersebut. Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara di bumi tercinta Indonesia ini. Pengembangan pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan generasi muda supaya memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kesadaran berdemokrasi di kota salak.

Pada akhirnya, semua pihak harus turut serta di dalam pendidikan politik agar masyarakat mau dan peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Apabila tidak dimulai dari sekarang, hal ini dapat menyebabkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kaum muda sebagai generasi penerus harus bangkit dan sadar bahwa pendidikan politik merupakan kunci dari kesejahteraan dan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan kondisi demikian, pemilih lebih bersifat apatis dan acuh terhadap setiap moment pesta demokrasi di Kabupaten Bangkalan.

“Memang jika kita perhatikan ada juga anggapan orang seperti itu, tapi meskipun orang-orang desa itu mempunyai kesibukan dalam artian keseharian mereka ngarit atau layaknya orang petani. Namun mereka tetap beranggapan bahwa memilih pemimpin itu sifatnya wajib karna dalam agama pun dianjurkan bahwa memilih pemimpin itu wajib, meskipun ada sebagian orang mengatakan bahwa siapapun yang dipilih sama saja begitu, sehingga pada akhirnya mereka tidak memilih dan

ketua KPU kabupaten/ kota menginstruksikan agar penyelenggara benar-benar memegang teguh prinsip netralitas. mencoreng lembaga penyelenggara.

Bagi penyelenggara pilkada, setidaknya ada dua hal yang termasuk pelanggaran berat, yakni: a) menghilangkan hak pilih warga; b) mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Kedua hal tersebut diusahakan untuk dihindari seorang penyelenggara pilkada atau pemilu. Jika pelanggaran di atas dilakukan, karier penyelenggara tersebut akan “tamat”. Namanya akan masuk “daftar hitam” di lembaga penyelenggara kepegiluan. Ia tidak akan diterima jika suatu hari kemudian ia ikut mendaftar sebagai penyelenggara.

KPUD juga telah membuktikan netralitas dirinya sebagai penyelenggara pada pemilihan 2012, meski pada saat itu antusiasme masyarakat sedikit menurun akibat beberapa insiden massa salah satu paslon yang menduduki kantor KPUD.

Dalam upaya menjaga netralitas, KPUD bangkalan memang sempat ditengarai tidak netral saat PILKADA 2012 lalu, pencoretan pasangan Imam Buchori-Zainal Alim menjadi salah satu pemicunya. Massa pendukung pasangan kiai imam kemudian menduduki kantor KPUD hampir selama sepekan. Pasca itu kepercayaan masyarakat sebagai pemilih sedikit demi-demi sedikit meras tidak percaya kepada KPUD sebagai penyelenggara.

Namun isu ketidaknetralan itu kemudian ditepis dengan tegas oleh KPUD. Sebab pencoretan pasangan Imam Buchori-Zainal Alim

hak-hak politiknya sebagai warga negara. Bilamana norma atau hukum yang mewajibkan netralitas bagi penyelenggara pemilu dikaitkan pada penerapan faktualnya, maka akan ditemukan suatu indikator menarik.

Artinya, semua gagasan baik yang tertuang secara normative dalam undang-undang ataupun gagasan keberpihakan penyelenggara selalu menjadi sorotan baik di mata public maupun pengawas pemilu. Dalam hal ini KPUD Kabupaten Bangkalan sudah bersikap netral baik dari sisi aturan main perundang-undangan atau bahkan secara keberpihakan perorangan.

Melihat pengalaman Peilkada 2012, para kandidat calon bupati dan wakil bupati berjuang secara individu meraih suara sebanyak-banyaknya. Hal ini membuat para kandidat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara, termasuk dalam hal pendanaan kampanye serta manuver politik. Tidak jarang terjadi persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik, baik antar caleg satu partai maupun caleg beda partai. Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

kecuali yang berada pada pemerintahan itu adalah para ustadz atau kyai. Karena pemerintahan itu hanya sebatas formalitas.

Dengan begitu, masyarakat Madura seperti halnya Bangkalan menganggap Pemerintah adalah sebagai urutan ketiga setelah guru dan orang tua. Dengan budaya semacam itu, proses pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden tak lebih seperti perayaan seremonial belaka bagi masyarakat. Dengan kondisi demikian Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara mempunyai tugas yang cukup kompleks dalam menyakinkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang penting demokrasi dan pemilihan umum.

Dengan begitu, kinerja Komisi pemilihan umum daerah menjadi bagian paling ungu dalam setiap momen pergantian pemimpin di daerah. Dari paparan data yang telah disajikan sebelumnya, KPUD Bangkalan berusaha memilah tipologi pemilih sesuai dengan perilakunya, terlebih KPUD Bangkalan berusaha menselaraskan setiap sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu langkah yang dilakukan ialah memetakan segmentasi dalam masyarakat. Segmentasi adalah pembilahan social yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat terpilah-pilah kepada kelompok-kelompok pemilih yang homogen yang potensial, hal itu tentu berdasarkan database kependudukan atau daftar pemilih tetap.

Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, perilaku, yang berbeda. Oleh karena itu pendekatan pendidikan pemilih yang dilakukan kepada masing-masing kelompok tersebut harus berbeda dengan karakter dari setiap segmen.

nya pemimpin daerah bagi mereka, karena bagi masyarakat Madura secara umum *pongaba* atau *ratoh* berada di urutan ketiga setelah orang tua dan guru.

B. Kofirmasi Dengan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori diantaranya teori perencanaan strategi model John Middleton untuk menganalisis hasil temuan penelitian melalui teori diatas. Hasil dari temuan peneliti yang sudah ditetapkan sebelumnya dicari relevansinya dengan teori-teori yang ada, sehingga ditemukan sebuah jawaban yang relevan dengan teori.

Berdasarkan teori tersebut, KPUD Bangkalan Dari hasil penelitian, strategi komunikasi KPUD bangkalan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Perencanaan komunikasi yang dimaksud adalah untuk memperhatikan dan menentukan komponen-komponen komunikasi serta meminimalisir faktor-faktor penghambat pada setiap komponen tersebut dalam hal untuk mewujudkan tujuan dari sosialisasi ppeningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Bangkalan. Selain dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam konteks sosialisasi pemilihan kepala daerah lebih jauh lagi sosialisasi dan persuasive ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran politik di Kabupaten Bangkalan.

Secara garis besar penelitian ini menggunakan penerapan strategi komunikasi model John Middleton. Artinya sebelum merancang strategi

dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPUD harus menetapkan database atau yang lumrah disebut dengan daftar pemilih tetap.

Di Tahun 2012 dengan jumlah Daftar pemilih tetap sebanyak 888.928 suara, Sementara pada Tahun 2018, jumlah daftar pemilih tetap memang terbilang menurun, alasannya tentu tingkat populasi masyarakat yang berkurang berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. sebanyak 859.067 pemilih tercatat dalam data KPUD Kabupaten Bangkalan. Jika merujuk pada model komunikasi John Middleton. Promosi atau kampanye haruslah berdasarkan kepada database assessment. Artinya promosi atau kampanye yang dilakukan tidak bisa dilakukan kepada khalayak umum dalam arti di ruang lingkup oleh teritori wilayah.

Setelah menetapkan database atau DPT. KPUD kemudian mulai memetakan segmentasi pemilih menurut pada tipologi dan karakteristik pemilih, dengan begitu KPUD Bangkalan dapat menentukan cara yang akan dipilih dalam menentukan model pendekatan kepada pemilih. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih, secara operasional dapat ditelusuri dari beberapa kondisi di sekitar "golput" dan memadukannya untuk mencari titik temu secara operasional, yaitu:

Kondisi yang menjadi masalah / penyebab kurangnya atau rendahnya partisipasi pemilih. Lini partisipasi pada segmentasi pemilih rentan : pemilih pemula, *swing voters*, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi, kaum "golput".

Stakeholders aktif, yakni “siapa yang berkepentingan dengan partisipasi pemilih”. Ketiga variabel di atas perlu ditelusuri sambil mengenali secara tepat:

- a). Karakter pemilih
- b. Nilai-nilai budaya lokal
- c). Mendekatkan pemilih pada isu kemanfaatan pemilu

Ketiganya dimaksudkan agar terbentuk konstruksi berpikir pada masyarakat bahwa pemeranannya dengan ikut pemilu secara aktif (sebagai pemilih) adalah memang kepentingan dan kebutuhannya (bukan sekedar hak atau wajib). *Pertama* mencari penyebab kurang/ rendahnya partisipasi. Dari penelitian penulis di atas, beberapa faktor di sekitar rendahnya apresiasi terhadap pemilu yang kemudian merembes kepada menjauhnya dari urusan pemilu, adalah, pragmatisme masyarakat yang kemudian mengukur aktivitas pemilu dan aktivitas elektoral peserta pemilu dari sudut pandang kepentingan mereka (yang kerap bernilai pragmatis). *Kedua*, bertolak dari rendahnya apresiasi terhadap pemilu. Ini adalah persepsi negatif pemilih terhadap “apa dan siapa yang akan dipilih”. *Ketiga*, mendekatkan jarak politik dan ikatan sosial pemilih dengan peserta pemilu. Faktor informasi (misalnya kelangkaan informasi tentang pemilu) tidak serta merta menjauhkan masyarakat dari keputusannya untuk ikut pemilu, namun berada pada dataran pemahaman materi pemilu saja. Dari sisi partisipasi pemilu, tidak mengkhawatirkan, justru dari sisi kepentingan peserta pemilu yang mengkhawatirkan, karena kelangkaan informasi pemilu bisa membiaskan pemilih seperti salah pilih dsb.

Ketiga poin di atas sekaligus bisa mengikis persepsi publik terhadap isu pemilu (bagian dari isu politik), bahwa urusan pemilu yang dipersepsi sebagai urusan elit (bukan urusan rakyat) menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Sayangnya, isu politik masih dianggap “horor”, sulit, tidak terjangkau, tingkat tinggi, penuh tipu-tipu. Dan itu urusan elit. Nah. Mengubah persepsi ini yang semestinya menjadi isu utama pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

Hal itu kemudian menjadi salah satu isu yang menjadi dasar dari perumusan strategi KPUD kabupaten bangkalan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Jika merujuk pada langkah-langkah strategi komunikasi model John Middlethorpe, Pengumpulan data base line dan need assessment. Pengumpulan data base line menjadi hal yang sangat penting dalam perencanaan komunikasi. Setiap aspek perencanaan akan mengacu pada data base line atau penelitian. Kegiatan penelitian ini akan dihasilkan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini KPUD kabupaten bangkalan sudah melakukan proses data base line dan need assessment dalam bentuk pendataan daftar pemilih tetap (DPT).

Setelah itu, Penentuan tujuan bisa dilakukan dengan memperhatikan masalah yang dihadapi dan akhirnya merumuskan bagaimana keadaan masalah tersebut setelah program dilaksanakan. Penentuan tujuan harus spesifik supaya dengan jelas dan komprehensif bisa dilaksanakan. Kemudian objective dari sebuah program haruslah terukur apalagi saat dilakukan evaluasi. Kemudian objective harus bisa dijangkau dengan sumberdaya yang ada. Objective kemudian harus realistis sesuai dengan waktu yang tersedia

dan budget yang ada beserta sumber daya lain, dengan kata lain francangan awal formulasi strategi dapat dilakukan setelah perumusan selesai.

Strategi adalah cara yang disusun seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai objective yang ditentukan. Strategi ini merupakan dasar dari taktik yang akan dibuat dalam setiap keadaan di lapangan.

Analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilaksanakan dengan menentukan siapa target sasaran program yang sedang dijalankan. Analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada tipe publik yang dihadapi. Pemrogram komunikasi setidaknya harus memilah publik menjadi tiga kelompok. Pertama, Latent Public yaitu kelompok yang menghadapi masalah dan tetapi tidak mempunyai perhatian lebih. Kedua, adalah aware public, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap masalah. Sedangkan yang terakhir adalah active public yaitu kelompok yang melakukan tindakan terhadap masalah, seperti memetakan tipologi pemilih melalui kecenderungan khalayak.

Pemilihan media sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tiap tahap berikut ini. Pertama mendaftar media yang sudah ada. Semua media yang mungkin mendukung program komunikasi di data dan bila perlu dikelompokkan menurut keperluan program. Setelah pendataan dilakukan evaluasi, media mana saja yang sesuai dari segi waktu, jangkauan segment, biaya, dan efektifitas.

Pendesainan dan pengemasan pesan lantas dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, segment dan berpanduan pada teori-teori dan keilmuan yang ada.

perancangan struktur manajerial beserta job deskripsi masing-masing. Mekanisme-mekanisme perlu disiapkan dalam hal ini misal, bagaimana alur dana berjalan. Selain itu bagaimana koordinasi dilakukan dilapangan, dan sebagainya.

Setelah perumusan strategi beserta analisis dilakukan KPUD Kabupaten bangalan kemudian mengimplementasi rumusan strategi dengan program yang telah ditentukan. Beberapa hal yang umum dilakukan adalah melakukan lobby-lobby, silaturahmi, dan sosialisasi. Pembentukan sistem pengontrol di lapangan juga biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri. Tentunya hal ini bergantung pada lobby-lobby yang telah dilakukan tersebut.

Evaluasi Program dibutuhkan untuk melihat apa saja tindakan dalam program yang tepat dan mana yang tidak sehingga ke depannya bisa dilakukan program yang lebih baik. Evaluasi bisa dibagi menjadi dua yaitu evaluasi ongoing dan end review. Evaluasi ongoing dilaksanakan selama proses berlangsung dan akan menjaga fleksibilitas sebuah program. Sedangkan end review mencakup semua evaluasi dari awal sampai akhir yang akan merangkum semua evaluasi ongoing dan perbaikannya sehingga bisa dijadikan pijakan untuk pelaksanaan program berikutnya.

BAB V

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari yang telah diuraikan oleh peneliti dalam penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan tentang, bagaimana strategi Strategi KPU Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada antara lain

Strategi atau upaya yang dilakukan KPU kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati antara lain:

- a) Strategi Penguatan Kelembagaan yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Strategi ini dalam penerapannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada Publik.
- b) Strategi Sosialisasi Politik merupakan salah satu cara yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan metode sosialisasi tatap muka (face to face) dan melalui media. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh

pemuda, kelompok perempuan dan kelompok mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak, media masa dan media elektronik.

- c) Strategi Pendidikan Pemilih Pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula, dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat, dengan menggandeng Pemilih Pemula.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka disarankan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas dan wewenang serta dapat mensukseskan pemilihan umum secara maksimal, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait. Adapun saran lain, yaitu:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendorong KPU untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih.
2. KPU Kabupaten Bangkalan diharapkan bisa memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkat partisipasi pemilih tidak monoton dan jangkauan dan kuantitasnya diperbanyak lagi.
3. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan terutama pemilih pemula atau pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.

4. Pelaksanaan Pemilu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara (KPU), pemerintah, partai Politik dan masyarakat, perlu ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan.
5. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD selayaknya dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam arti ada monitoring berkala supaya peningkatan partisipasi pemilih berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran politik di Kabupaten Bangkalan



